

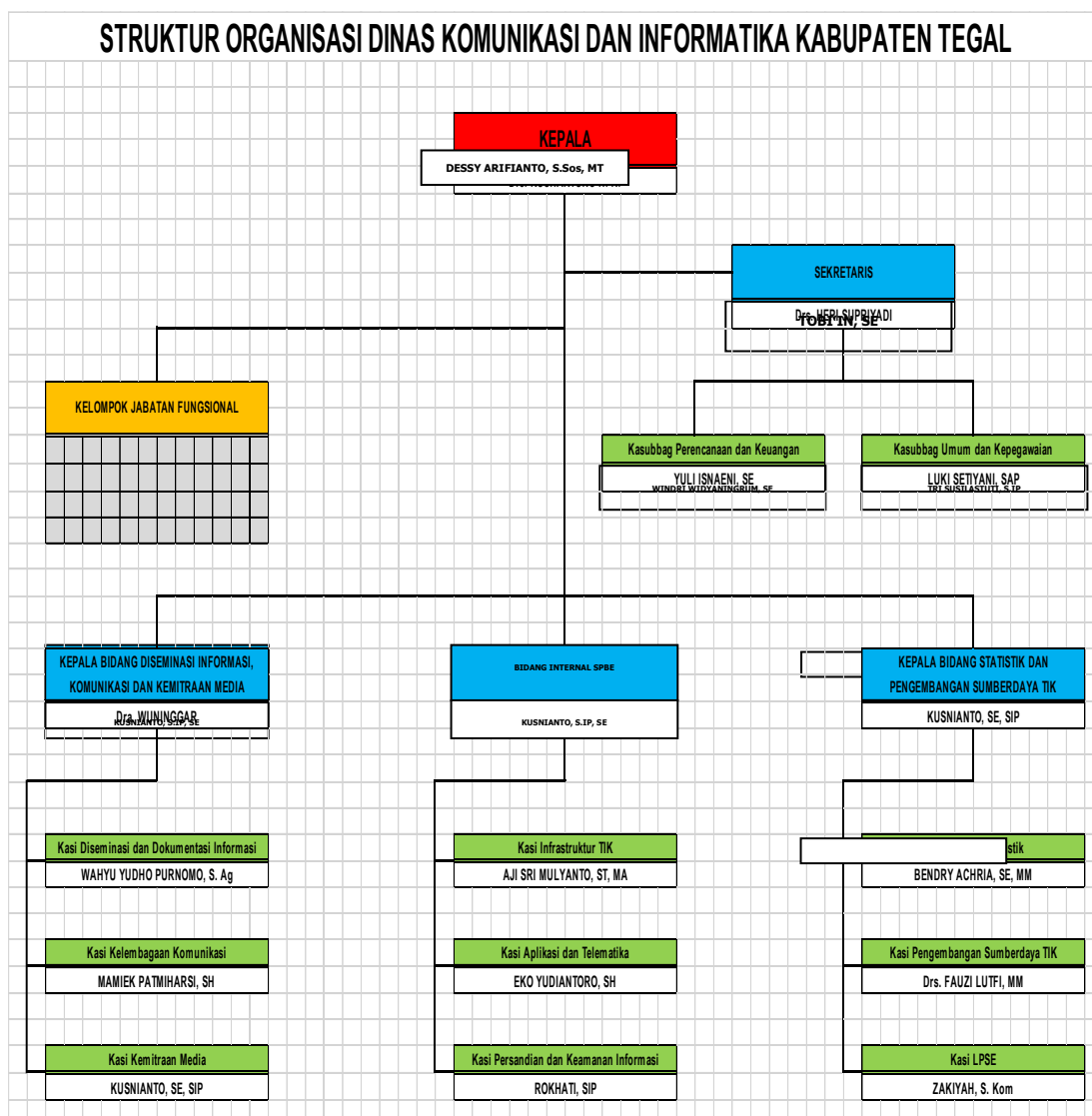
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



Sedangkan menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, diuraikan sebagai berikut :

A. KEWENANGAN

- a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten;
- b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten;
- c) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten;
- d) Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten;
- e) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
- f) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEPALA DINAS

- 1) Tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- 2) Fungsi :
 - a. Penetapan rencana kerja;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian

3) Uraian Tugas :

- a. Menetapkan rencana kerja
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Membina dan memberikan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan / ketatusahaan Dinas
- f. Menginventarsasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
- i. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja
- b. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas

2. SEKRETARIS

1) Tugas pokok melaksanakan membantu tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

2) Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan
- c. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;

3) Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan draf rencana Kerja
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan / ketatausahaan
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
- e. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum
- f. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing

- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
- j. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan ketepatan draf penyusunan rencana kerja
- b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan perumusan draf kebijakan teknis bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan kesekretariatan / ketatausahaan
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat.

3. Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi & Kemitraan Media

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Diseminasi Informasi, Komunikasi, Dan Kemitraan Media

2) Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media
- c. Pelaksanaan pengembangan diseminasi informasi
- d. Pelaksanaan pengembangan komunikasi sosial dan publik
- e. Pelaksanaan pengembangan Komunikasi Pemerintah Daerah
- f. Pelaksanaan kemitraan Media
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media

3) Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan Media
- c. Melaksanaan penyusunan rencana dan standar prosedur kegiatan kemitraan dengan media, guna mendukung tugas tugas dibidang informasi dan komunikasi pemerintah daerah
- d. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan komunikasi pemerintah daerah
- e. Melaksanakan pelayanan komunikasi dan informasi publik melalui media komunikasi sosial masyarakat berupa tatap muka, pemutaran film dan media tradisional
- f. Melaksanakan pengelolaan media dan pemberitaan, pendistribusian bahan bahan pemberitaan, evaluasi pemberitaaan dan pengkajian dampak media komunikasi sesuai dengan fakta yang berkembang agar dapat diketahui masyarakat
- g. Memberikan pelayanan teknis bidang pengembangan sistem informasi dan kelembagaan komunikasi sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menjalin dan mengadakan kerjasama hubungan kelembagaan komunikasi sosial dan komunikasi pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan luar negeri
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
- l. Melaksanakan pengendalian, dedikasi dan loyalitas bawahan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

4) Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media

- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media
 - d. Ketepatan distribusi tugas pemberian motivasi kepada bawahan
 - e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi
 - f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
- 1) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur TIK, aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan informasi
 - c. Pelaksanaan pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika persandian dan keamanan Informasi.
 - 3) Uraian Tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
 - b. Menyiapkan bahan perumsan kebijakan teknis pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis bidang pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi, sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi.
 - e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan

Telematika, persandian dan keamanan Informasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing
- g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
- h. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan keamanan Informasi.
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan pengembangan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Telematika, persandian dan Keamanan Informasi.
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

5. Kepala Bidang Statistik Dan Pengembangan Sumberdaya TIK

- 1) Kepala Bidang Statistik dan Pengembangan Sumberdaya TIK mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Pengembangan Sumberdaya TIK mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik
 - c. Pelaksanaan pengembangan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa

secara elektronik

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik.

3) Uraian Tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis statistik pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. Melaksanakan penyusunan rencana dan standar prosedur kegiatan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa elektronik
- d. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik, serta menyajikan alternatif pemecahannya
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing masing
- g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
- h. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja
- b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan tugas bidang statistik, pengembangan sumberdaya TIK dan layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik;

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal sebanyak 33 orang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	IV A	1
2.	Sekretaris	IV B	1
3.	Kepala Bidang Statistik Dan Pengembangan Sumber Daya TIK	-	-
4.	Kepala Bidang TI Dan Persandian	IV A	1
5.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi Dan Kemitraan Media	IV A	1
6.	Kapala Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan	III D	1
7.	Kapala Sub Bag Umum Kepegawaian	III D	1
8.	Kepala Seksi LPSE	III B	1
9.	Kepala Seksi Diseminasi Informasi, Komunikasi Dan Kemitraan Media	III B	1
10.	Kepala Seksi Kemitraan Media	III D	1
11.	Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Informasi	III D	1
12.	Kepala Seksi Pengembangan Dan Sumber Daya TIK	IV A	1
13.	Kepala Seksi Data Dan Statistik	-	-
14.	Kepala Seksi Infrastruktur TIK	III D	1
15.	Kepala Seksi Aplikasi Dan Telematika	III D	1
16.	Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi	III D	1
17.	Staf	III	10
18.	Staf	II	10
19.	Staf	I	1
Jumlah			33

Keadaan pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	SD	1	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	10	
4.	D3	1	
5.	S1	18	
6.	S2	3	
	Jumlah	33	

Sedangkan jumlah pejabat fungsional adalah sebagai berikut :

No	Pejabat Fungsional	Jumlah
1	Pranata Komputer Pelaksana	1
2	Pranata Komputer Pertama	2
3	Pranata Komputer Muda	1
	Jumlah	4

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Kominfo Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
----	-------------	--------	------------

1	ASET TETAP		
	PERALATAN DAN MESIN		
	- Alat-alat Besar	1	79.013.000.000
	- Alat-alat Angkutan	14	1.081.252.930
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	79.390.900
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	433	3.371.519.274
	- Alat Studio dan Komunikasi	97	1.409.176.960
GEDUNG DAN BANGUNAN			
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	785.350.385	
	JUMLAH ASET		6.807.397.449

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Bab ini menjelaskan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian -pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019. Data dan informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai persoalan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah mendorong terbentuknya Lembaga Komunikasi Masyarakat/Kelompok Informasi Masyarakat (LKM/KIM) untuk penyebarluasan informasi tentang pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan disampaikan balik kepada pemerintah, dimana LKM/KIM adalah sebagai media penghubung yang terkoordinir antara pemerintah dan masyarakat. Dengan Program Diseminasi Informasi, Komunikasi Dan Kemitraan Media diharapkan LKM/KIM dapat terbentuk di 287 desa di seluruh Kabupaten Tegal.

Selain itu sesuai dengan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka artinya badan publik yang dalam

pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Tabel 2. 1 Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Jumlah Badan Publik Yang Terbuka Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	0	0	0	0	41,60
2	Jumlah Desa yang telah terbentuk LKM/KIM	6	6	6	6	6
3	Pengembangan KIM	2	4	6	8	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2018 telah melakukan klarifikasi tingkat KIP Badan Publik dan telah terbentuk LKM/KIM di 30 Desa dalam 5 Kecamatan (Slawi, Lebaksiu, Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna). Adapun persentase pengembangan KIM pada tahun 2018 mengalami peningkatan 10 % dibanding tahun 2017 sebesar 8%.

2) Teknologi Informasi dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Pemerintah diharapkan meningkatkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan pengukuran tingkat maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada domain tata kelola SPBE, kebijakan internal dan layanan SPBE. Domain kebijakan internal terdiri atas 2 aspek yaitu tata kelola dan layanan. Domain tata kelola SPBE terdiri atas 3 aspek yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan dan teknologi informasi dan komunikasi. Domain Layanan SPBE terdiri atas 2 aspek yaitu administrasi pemerintahan dan layanan publik. Tujuan pengukuran indeks SPBE adalah 1) mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. 2) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. 3) menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Indeks KAMI merupakan tools untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI ISO / IEC 27001 yaitu 1) tata kelola 2) pengelolaan resiko 3) kerangka kerja 4) pengelolaan aset 5) aspek teknologi.

Tabel 2.2 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	NA	1,9	1,8
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	NA	147

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi Smart City yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bimtek internet sehat bagi	0	0	0	0	100

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	masyarakat					
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	0	0	0	0	0
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	0	0	0	0	100
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	0	0	20
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatik, Tahun 2018

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pememerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek e-procurement secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Tabel 10.5 berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018.

Tabel 2.4 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan Dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	0	0	118	238
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	0	6	7	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2017 Pelaku Pengadaan berjumlah 118 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tegal

4) Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten melalui penerbitan buku Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Nilai Tukar Petani, Analisis Sistuisi Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tegal dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Tegal.

Pembangunan membutuhkan kekuatan, dan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar pembangunan yang

akan dilaksanakan kuat adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir. Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas. Data Statistik Sektorial Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 Jumlah Ketersediaan Data Sheet Dan Laju Penggunaan Statistik Sektorial Pemerintah Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Data Sektorial Statistik yg Terintegrasi dgn SDS	0	0	0	0	0
2	Laju Akses Data Statistik Sektorial Oleh Masyarakat dan Stakeholders (%)	0	0	0	0	0
3	LPSE	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2018, data baru dapat terwujud pada Tahun 2018 karena dalam melaksanakan pengumpulan, mengolah, menyusun, dan menganalisis serta mempublikasikan statistik sektorial baru mulai pelaksanaan pada akhir Tahun 2018 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tegal baru terbentuk pada Tahun 2017 sehingga laju akses data juga belum termanfaatkan.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari sejauh mana Pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2014 - 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 - 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/ Indikator lain)	Tar get	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IKU (Indikator Kinerja Utama)																	
1	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	78%	-	-	-	76%	78%	-	-	-	76,25	-	-	-	-	103%	-	
2	Persentase jumlah FK METRA yang aktif	100%	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	
3	Persentase jumlah LKM KIM yang aktif	100%	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	
4	Prosentase OPD yang telah menerapkan keamanan informasi	65%	-	-	-	50%	65%	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
5	Prosentase OPD yang menerapkan SIMAYA	15%	-	-	-	10%	15%	-	-	-	10%	-	-	-	-	100%	-	
6	Prosentase level LPSE	100%	-	-	-	60%	100 %	-	-	-	58,82 %	-	-	-	-	98,03%		
7	Prosentase pemenuhan tugas kesekretariatan	100%	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal 2015 - 2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			562.500	1.207.360	1.367.860			489.035	1.016.549								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.000	4.360	4.360			4.118	4.100				82,36	94,04		-6,40	11,68
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			325.000	918.000	1.050.000			267.198	741.697				82,21	80,79		98,42	-1,42
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor			32.500	50.000	50.000			32.500	49.254				100,00	98,51		26,92	-1,49
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000	20.000	20.000			10.242	15.549				68,28	77,75		12,50	9,47
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			15.000	20.000	15.000			15.000	19.842				100,00	99,21		0	0,79

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kantor																		
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000	15.000	12.500			4.999	14.987				99,99	99,92		108,33	-0,07	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			10.000	10.000	11.000			9.720	9.320				97,20	93,20		5,00	-4	
8	Penyediaan makanan dan minuman			35.000	50.000	60.000			32.032	44.656				91,52	89,31		31,43	-2,21	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			120.000	115.000	140.000			113.224	114.306				94,35	99,40		8,79	5,05	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			0	5.000	5.000			0	2.835				0	56,70		0	56,70	
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			985.000	1.026.704	485.000			900.307	956.949									

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			60.000	125.000	30.000			55.360	121.731					92,27	97,38		16,16	5,11
12	Pengadaan mebeleur			100.000	0	0			94.755						94,76	0		0	-94,76
13	Pengadaan Komputer			400.000	186.704	30.000			365.275	177.800					91,32	95,23		-68,63	3,91
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			25.000	100.000	50.000			23.085	96.920					92,34	96,92		125,00	4,58
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			150.000	175.000	175.000			134.349	135.613					89,57	77,49		8,33	-12,08
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			20.000	50.000	50.000			17.967	41.135					89,84	82,27		125,00	-7,57
17	Pengadaan Peralatan LPSE			200.000	0	150.000			180.143	0					90,07	0		25,00	-90,07
18	Penyusunan DED Gedung			30.000	0	0			29.371						97,90	0		0	-97,90

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	data centre																		
19	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor			0	200.000	0				197.291				0	98,65		0	98,65	
20	Penataan Lingkungan Kantor			0	190.000	0				186.458				0	98,14		0	98.14	
III	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000	50.000	88.500			41.027	42.142									
21	Pendidikan dan pelatihan formal			50.000	50.000	50.000			41.027	42.142				82,05	84,28		0	2,23	
22	Survei kepuasan masyarakat			0	0	28.500			0	0				0	0		0	0	
23	Maturitas SPIP			0		10.000			0	0				0	0		0	0	
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			50.000	50.000	55.000			37.930	42.319									

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kinerja dan Keuangan																		
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5.000	5.000	5.000			4.180	4.463				83,60	89,27		0	5,67	
25	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah			45.000	45.000	50.000			33.750	37.856				75,00	84,12		5,55	9,12	
IV	Program : Pengembangan data/informasi/statistik daerah			200.000	300.000	300.000			198.689	294.494									
26	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			100.000	200.000	200.000				197.511				98,77	98,76		50,00	-0,01	
27	Penyusunan dan pengumpulan			100.000	100.000	100.000			99.919	96.982				99,92	96,98		0	-2,94	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	n data PDRB																		
V	Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.657.720	1.272.000	1.320.000			681.733	1.100.213									
28	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			325.000	100.000	100.000			314.336	93.462				96,72	93,46		-34,61	-3,26	
29	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			105.000	40.000	40.000			98.147	39.321				93,47	98,30		-30,95	-4,83	
30	Pengadaan alat studio			1.000.000	0	0			45.713	0				4,57	0		0	-4,57	
31	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi			0	0	60.000			0	0				0	0		0	0	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal			177.720	180.000	180.000			174.310	169.908				98,08	94,39		0,64	-3,69
33	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara telekomunikasi			50.000	0	0			49.226	0				98,45	0		0	-98,45
34	Pengembangan Data Centre			0	100.000	150.000			0	97.907				0	97,91		50,00	97,91
35	Pengelolaan Keamanan Informasi			0	30.000	45.000			0	24.068				0	80,23		50,00	80,23
36	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Maya (SIMAYA)			0	50.000	0			0	48.574				0	97,15		0	97,15
37	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik			0	237.000	280.000			0	194.834				0	82,21		18,14	82,21

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
38	Bimbingan Tekhnis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)			0	100.000	80.000			0	70.048				0	70,05		- 20,00	70,05
39	Fasilitasi Penilaian Jabatan Pranata Komputer			0	40.000	60.000			0	31.487					78,72		50,00	78,72
40	Bimbingan Tekhnis Internet Sehat Bagi Masyarakat			0	70.000	60.000			0	58.105				0	83,01		- 14,28	83,01
41	Bimbingan Tekhnis TIK Untuk Aparatur Pemerintah			0	75.000	65.000			0	66.030				0	88,04		- 13,33	88,04
42	Pengembangan e-Government Kabupaten Tegal			0	200.000	200.000			0	157.635					78,82		0	78,82
43	Penyusunan DED jaringan infrastruktur			0	50.000	0			0	48.830				0	97,66		0	97,66

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
VI	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				15.000	15.000				9.170								
44	Penyelenggaraan pameran investasi			0	15.000	15.000				9.170				0	61,14		0	61,14
VII	Program : Kerjasama informasi dengan mas media			568.000	280.000	300.000			546.441	256.438								
45	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			161.000	180.000	180.000			157.422	168.563				97,78	93,65		11,80	-4,13
46	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			382.000	25.000	30.000			364.068	20.845				95,31	83,38		-36,72	-11,93
47	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			25.000	50.000	50.000			24.950	42.029				99,80	84,06		50,00	-15,74
48	Pengelolaan Website			0	25.000	40.000			0	25.000				0	100,00		60,00	100

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Pemerintah Kabupaten Tegal																		
VII	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah			10.000	11.000	34.000			8.567	10.660									
49	Review renstra SKPD			10.000	0	0			8.567	0				85,67	0		0	-	85,67
50	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD			0	3.000	6.000			0	2.858				0	95,27		100,00	0	97,27
60	Penyelenggaraan forum SKPD			0	8.000	8.000			0	7.802				0	97,53		0	0	97,53
61	Penyusunan Renstra SKPD			0	0	20.000			0	0				0	0		0	0	0
	Jumlah			4.083.220	4.212.064	3.965.360			2.903.729	3.728.936				71,11	88,53		-1,35	17,42	

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal secara umum sudah cukup baik, hal ini disebabkan dukungan program dan kegiatan serta komitmen yang tinggi. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum tercapai yaitu prosentase OPD yang telah menerapkan keamanan informasi, hal ini disebabkan karena penerapan keamanan informasi masih dalam tahap sosialisasi.

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal tahun 2017 sebesar Rp. 4.083.220.000 anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 4.212.064.000 anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.965.360.000 sehingga rata - rata pertumbuhan anggaran sebesar -1,35%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 2.903.729.000 realisasi anggaran tahun 2018 Rp. 3.728.936.000 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 17,42 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pelayanan masyarakat khususnya bidang Teknologi dan Informatika di tingkat Kabupaten, Dinas Kominfo Kabupaten Tegal mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.
- b. Informasi dari badan publik yang kurang transparan kepada masyarakat.
- c. Tidak meratanya system jaringan komunikasi.
- d. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan akses TIK.
- e. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi.
- f. Implementasi e-government yang belum maksimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal Dinas Kominfo maupun dengan SKPD lain ditingkat Daerah, Provinsi, maupun Pusat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dibidang Teknologi Informatika. Kedepan diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal memiliki tenaga fungsional di bidang IT yang lebih handal.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan aparatur sebagian besar sarjana dan diploma.

- b. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- c. Inovasi dan kreatifitas para aparatur dalam pelaksanaan tugas.
- d. Adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas meskipun baru sebatas regulasi secara umum.
- e. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Kominfo dengan Perangkat Daerah yang lain, maupun pihak – pihak diluar pemerintah yang berkepentingan.
- f. Implementasi satu data daerah pada satu portal data.
- g. Pemetaan rencana pengembangan infrastruktur TIK.